



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pendidikan di Indonesia dikelola dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pembagian kewenangan dengan pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Saat ini pemerintah pusat telah membuat kebijakan baru melalui kurikulum merdeka, yang menjadikan peserta didik sebagai target utama dalam pembentukan generasi yang berkarakter pancasila yang responsif terhadap perkembangan zaman di era globalisasi.¹ Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pergantian kurikulum yang diberlakukan di Indonesia.

Kurikulum nasional yang berlaku saat ini adalah Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum fleksibel yang berbasis karakter dan kompetensi, serta kreativitas. Kurikulum Merdeka tidak membatasi konsep pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah, tetapi lebih mengedepankan pada kreativitas guru dan juga siswa.²

Penerapan Kurikulum Merdeka sesuai dengan keputusan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.³ Selain sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan, keputusan

¹ Hilmin, dkk, “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Kurikulum Merdeka), *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 2 No. 2, (2022), 149.

² Yaelasari, M., & Yuni Astuti, V. “Implementasi Kurikulum Merdeka pada Cara Belajar Siswa untuk Semua Mata Pelajaran (Studi Kasus Pembelajaran Tatap Muka di SMK INFOKOM Bogor).” *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 3, No. 7, (2022), 584– 591.

³ Nabillatus Solikhah, Aktim Wahyuni, “Analisis Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar”, *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 8, No. 2, (2023), 2477.

tersebut dilakukan sebagai opsi pemulihan pembelajaran selama 2022-2024.⁴

Saat ini, implementasi Kurikulum Merdeka sudah diterapkan bahkan sedang marak dibicarakan, didiskusikan, diperbincangkan, serta diseminarkan di berbagai lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Kurikulum Merdeka rencananya akan diterapkan di seluruh satuan pendidikan yang ada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kebijakan ini sesuai dengan usulan yang diajukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021.⁵

Implementasi Kurikulum Merdeka diterapkan secara bertahap pada sekolah yang sudah siap untuk mengimplementasikannya. Mengingat kondisi sekolah di Indonesia yang beragam, maka sekolah diberi kebebasan untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kesiapan serta kondisi masing-masing sekolah. Hal tersebut menjadikan beberapa sekolah tidak langsung menerapkan Kurikulum Merdeka seperti salah satu sekolah yang berada di Kecamatan Bener Kelipah Aceh, yaitu MIN 6 Bener Meriah Aceh.

Implementasi kurikulum merdeka masih banyak mengalami kendala di beberapa satuan pendidikan, salah satunya adalah MIN 6 Bener Meriah Aceh. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan guru kelas I dan IV mengatakan bahwa hambatan yang dialami guru adalah masih kesulitan

⁴ Ujang Cepi Barlian, Siti Solekah, Puji Rahayu, "Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan", *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, Vol. 1, No. 12, (2022), 2107.

⁵ Fatimatu Zahrah, dkk, Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah: Tantangan Membangun Kualitas Pendidikan, *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)*, vol. 2, no. 1, (2023), 43.

dalam menyusun perangkat pembelajaran Kurikulum Merdeka.⁶

Pernyataan tersebut diperkuat oleh kepala sekolah, yang mengatakan bahwa terdapat beberapa hambatan yang dihadapi guru salah satunya adalah kesulitan untuk membuat perangkat pembelajaran. Selain itu, mereka juga masih kekurangan sarana dan prasarana seperti buku Kurikulum Merdeka, laptop atau komputer, dan peralatan lainnya.⁷

Berdasarkan paparan di atas penulis melakukan penelitian mengenai “hambatan yang dihadapi guru kelas di MIN 6 Bener Meriah Aceh dalam implementasi Kurikulum Merdeka”. Hal ini didasari oleh implementasi Kurikulum Merdeka yang masih tergolong baru di MIN 6 Bener Meriah Aceh.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, peneliti membatasi pada hambatan guru kelas I dan IV di MIN 6 Bener Meriah Aceh dalam implementasi Kurikulum Merdeka yang difokuskan pada penyusunan perangkat pembelajaran Kurikulum Merdeka.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti berfokus pada hambatan guru kelas dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi guru-guru di MIN 6 Bener Meriah Aceh dalam menyusun perangkat pembelajaran Kurikulum Merdeka?

⁶ Zubaidah dan Ferawati, *Wawancara*, Aceh, 26 Oktober 2023.

⁷ Yahya, *Wawancara*, Aceh, 15 Februari 2024.

2. Bagaimana guru-guru di MIN 6 Bener Meriah Aceh mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menyusun perangkat pembelajaran Kurikulum Merdeka?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan hambatan yang dihadapi guru-guru di MIN 6 Bener Meriah Aceh dalam menyusun perangkat pembelajaran Kurikulum Merdeka
2. Mendeskripsikan upaya guru MIN 6 Bener Meriah Aceh dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam menyusun perangkat pembelajaran.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi dan bahan pertimbangan pemerintah dan instansi pendidikan dalam pengambilan keputusan rekonstruksi maupun penerapan kurikulum baru.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah, kepala sekolah, guru dan masyarakat terkait tantangan guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan baru penulis tentang Kurikulum Merdeka dan permasalahan yang dialami. Sehingga penulis dapat memahami konsep serta tantangan

guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah dapat menjadi informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam implementasi kurikulum baru.
- b. Bagi sekolah dapat menjadi pengetahuan dan bahan evaluasi dalam menentukan pilihan dan penggunaan kurikulum serta untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penggunaan kurikulum yang tepat.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan adalah jalan untuk memudahkan pembahasan dan penyampaian tujuan, dalam penelitian ini sistematika pembahasan dibagi menjadi lima yaitu sebagai berikut:

Bab I, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, selanjutnya batasan masalah yang dijadikan untuk menghindari luasnya permasalahan yang akan dibahas, setelah permasalahan dibatasi maka selanjutnya untuk merumuskan permasalahan yang akan diteliti sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah. Setelah merumuskan permasalahan maka dilanjutkan dengan tujuan serta manfaat penelitian.

Bab II, yaitu menjelaskan tentang kajian teori yang berisi teori-teori dan argumen-argumen yang akan digunakan dalam penelitian. Yaitu mendeskripsikan terkait guru kelas dan kebijakan pemerintah dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas. Dan terakhir membahas

mengenai kerangka berpikir atau kerangka teoritik.

Bab III, tentang metode penelitian yang memuat terkait jenis dan pendekatan apa yang dipakai dalam penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data serta teknik analisis data.

Bab IV, yaitu memuat hasil yang sudah didapat dalam melakukan penelitian dan beberapa pembahasan lain yang terdiri dari gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

Bab V, adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang akan diajukan kepada beberapa pihak yang dituju. Setelah menjelaskan bab kelima terdapat daftar pustaka yang dijadikan sebagai tujuan dalam penelitian.

